FLORES POS
Dari Nusa Bunga untuk Nusantara
Senin, 19 Desember 2011 Nomor 65 Tahun XII Eceran Rp 3.000,00 16 Halaman E-mail: florespos@yahoo.co.uk

Bentara

Keluarga Katolik dan Surat Gembala itu

Oleh John Dami Mukese
PU SKH Flores Pos

Ketika hendak memasuki masa Adven tahun ini, keluarga-keluarga Katolik Keuskupan Agung Ende, disadarkan kembali akan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) mereka sebagai lembaga-lembaga paling bertanggung jawab dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera dan bahagia. Surat Gembala Uskup Agung Ende berjudul "Keibu-bapakan yang bertanggung jawab menuju keluarga yang sejahtera dan bahagia" secara amat lugas menjabarkan pentingnya peran keluarga-keluarga sebagai wadah utama lewat mana setiap orang bisa mencapai hidup sejahtera dan bahagia di dunia ini.

Di satu pihak, Surat Gembala itu adalah satu kabar gembira. Keluhuran martabat perkawinan, [illegible]nya perkawinan Kristen, ditonjolkan [illegible]i satu harta kekayaan Gereja yang harus [illegible]hara dan dibanggakan. Perannya yang sentral dalam pembentukan satu model kehidupan bermasyarakat yang bermartabat, ditonjolokan kembali. Nilai-nilai kristiani sebagai pilar-pilar penopang tegaknya keluarga-keluarga itu, diangkat kembali ke permukaan untuk dihayati secara lebih sadar.

Perkawinan yang adalah persatuan antara laki-laki dan perempuan dalam satu ikatan hukum, pada hakikatnya adalah satu "karunia" cuma-cuma. Perkawinan Kristen adalah satu karunia istimewa. Aspek ini ditekankan kembali untuk mengimbangi semakin menderasnya gejala bahaya sekularisasi yang melihat perkawinan sebagai satu gejala alamiah dan uangkapan kecenderungan naluriah semata.

Sebagai "karunia", hidup atau lembaga perkawinan Kristen memiliki hak-hak untuk dinikmati, tetapi juga memikul kewajiban-kewajiban untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan. Banyak keluarga Kristen hanya tahu menikmati hak-haknya, tetapi lupa memenuhi kewajiban-kewajibannya. Surat Gembala, yang terbilang panjang itu coba menyadarkan mereka dari keteledoran itu.

Di pihak lain, dalam kaitan dengan "keteledoran" tersebut, Surat Gembala itu juga hadir sebagai satu berita "kurang sedap" bagi banyak telinga Kristen. Uskup menantang mereka dengan kewajiban-kewajiban moral yang mereka harus penuhi. Tanggung jawab mereka sebagai benteng-benteng kuat untuk memelihara dan mempertahankan nilai-nilai moral Kristen, digugat. Misalnya, bagaimana keluarga-keluarga itu bersikap dalam menghadapi isu keluarga berencana. Isu ini telah lama menjadi medan pertarungan antarnilai di mana keluarga-keluarga F[illegible]n secara nyata diperhadapkan dengan persoalan [illegible]h. Memilih untuk memelihara dan mempertahankan nilai-nilai kristiani atau memilih untuk mengabaikan dan menghancurkannya.

Di bawah selubung yang tak sanggup lagi menyembunyikan banyak "rahasia", banyak keluarga Kristen, pasangan-pasangan Katolik, yang menyerah, dan pasrah saja berkompromi dengan pilihan sengaja "mengabaikan dan menghancurkan" nilai-nilai kristiani mereka. Kenyataan inilah yang mendorong Uskup Agung Ende berdesah: "Pertanyaan untuk umatku, apakah kita terus mengalah dan pasrah kepada tekanan dan tantangan zaman ini?" Dan, apakah jawaban umat, keluarga-keluarga Katolik sekeuskupan Ende?

Senggol

- Dewan gunakan perusahaan orang lain untuk kerja proyek.
- Dengan perhitungan dosanya akan ditanggung bersama.
- BI keluarkan aturan anti penyelewengan perbankan.
- Yang kita saksikan penyelewengan makin marak.
- Kehadiran guru magang dipertanyakan.
- Itu tanda tiada sosialisasi.

Om Toki

Opini

Anggaranku Sayang, Anggaranku Malang

Oleh Riki Martusa
Ketua Program Magister Akuntansi Universitas Kristen Maranatha dan Pengajar Bidang Ilmu Akuntansi

Isu adanya mafia anggaran di tubuh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menghiasi kolom utama di beberapa surat kabar nasional. Perputaran roda pemerintahan negeri ini menjadi tersendat oleh disfungsi di beberapa bagian internal. Penyumbatan demi penyumbatan yang telah terjadi dalam setiap bagian di negeri ini membuat kinerja pemerintah menjadi tidak maksimal. Padahal praktik anggaran dilakukan dengan tujuan untuk melakukan perencanaan dan pengendalian atas aktivitas operasional suatu lembaga atau negara. Jadi, pemerintah akan dapat menilai kinerja setiap pejabat di wilayah atau daerah tertentu di Indonesia melalui anggaran.

Dalam konteks negara, masyarakat juga dapat menilai kinerja kepala negara dalam memimpin negeri ini, yang diwakili oleh anggota DPR. DPR mempunyai kewenangan sebagai wakil rakyat seluruh Indonesia untuk menjamin hak-hak rakyat diperhatikan dengan baik oleh negara. DPR bukan hanya dapat melihat rencana pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi mereka juga dapat menentukan dan merumuskan isi APBN tersebut. Apabila anggota DPR melihat ada bagian APBN yang melenceng dari tujuan yang sudah disepakati, mereka dapat mengubahnya menggunakan hak budget.

Melalui mekanisme ini, perputaran roda pemerintahan negara Indonesia seharusnya berjalan dengan efektif dan efisien. Namun kenyataannya, roda pemerintahan kita tetap tersendat-sendat, karena beberapa oknum pejabat pemerintahan tidak melakukan tugasnya dengan baik, dan bahkan mereka melakukannya untuk kepentingan pribadi. Beberapa oknum anggota DPR diduga menggunakan hak budget-nya untuk kepentingan pribadi dengan menjadi calo bagi proyek-proyek yang berlangsung di pemerintahan. APBN, yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat, berubah menjadi ajang aji mumpung bagi beberapa oknum angota DPR.

Mekanisme praktik anggaran yang berlangsung di pemerintahan Indonesia tertuang dalam setiap program kerja yang akan dilaksanakan dalam APBN. Pada setiap pelaksanaan program kerja tersebut, pemerintah membutuhkan partner, yaitu konsultan atau pemasok. Agar program kerja tersebut berjalan dengan efektif dan efisien, maka pemerintah melakukan mekanisme pengendalian. Mekanisme pengendalian anggaran tercermin dalam pemilihan konsultan atau pemasok.

Cara memilih konsultan atau pemasok dapat menggunakan sistem tender atau sistem biaya standar. Sistem tender adalah sistem mekanisme pengendalian anggaran yang sangat sederhana dan mudah untuk dilakukan. Pemerintah akan menilai beberapa perusahaan yang menawarkan jasa konsultasi atau barangnya. Lalu pemerintah akan memilih konsultan atau pemasok sesuai dengan kebutuhan program kerja dengan menggunakan sistem tender. Pada pelaksanaan sistem tender ini, pemerintah akan mencari konsultan atau pemasok yang berkaitan dengan proyek yang akan dikerjakan. Ketika para konsultan atau pemasok mengajukan proposal penawaran kepada pemerintah, maka pemerintah akan memilih konsultan atau pemasok mana yang paling sesuai dengan tujuan dan dana anggaran program kerja tersebut. Jika penawaran dari konsultan atau pemasok lebih mahal dari besar biaya APBN yang tersedia, maka pejabat yang berwenang dalam proyek atau program kerja tersebut seharusnya menolaknya. Sebaliknya, jika penawaran dari konsultan atau pemasok lebih rendah besarannya dari biaya APBN, maka proyek atau program kerja tersebut dapat diterima.

Pelaksanaan sistem tender ini cukup efektif dan efisien, jika pengendaliannya dilakukan dengan baik. Namun, pelaksanaan sistem tender ini menjadi tidak terkendali karena ada beberapa oknum anggota DPR yang merusak pelaksanaannya. Ada oknum anggota DPR yang bekerja sama dengan konsultan atau pemasok tertentu. Jadi, pada pemilihan sistem tender tersebut, konsultan atau pemasok akan disimulasi agar terpilih. Oknum anggota DPR tersebut akan mendapatkan beberapa keuntungan dari para konsultan atau pemasok terpilih tersebut. Hasil pemilihan tender menjadi tidak efektif dan efisien lagi bagi pemerintah. Hal tersebut hanya menjadi tabungan pribadi oknum pejabat tersebut. Hasil pelaksanaan sistem tender menjadi tidak sesuai dengan tujuannya.

Cara lain untuk melaksanakan mekanisme sistem anggaran adalah menggunakan biaya standar. Pada penggunaan biaya standar, setiap pelaksanaan program kerja harus ada ukuran standarnya yang ditetapkan berdasarkan data dan kesepakatan dari seluruh bagian pemerintahan. Penentuan biaya standar memerlukan pengamatan atau observasi beberapa kegiatan yang merupakan bagian dari suatu operasional program kerja/proyek. Lalu kegiatan tersebut disimulasikan dari awal sampai akhir. Hasil simulasi tersebut harus diukur untuk mendapatkan biaya standar. Biaya standar tersebut akan dipakai untuk mengukur realisasi aktual dari pengerjaan program kerja atau proyek pemerintah tersebut. Setiap program kerja atau proyek yang dilakukan akan selalu melihat biaya standar sebagai acuan keberhasilan dari proyek tersebut.

Tetapi, waktu yang dibutuhkan untuk menyusun biaya standar cukup lama dan biaya yang dikeluarkan juga cukup mahal. Namun, apabila biaya standar dapat ditentukan, maka pengendalian proyek atau program kerja menjadi lebih mudah. Pemerintah hanya perlu membandingkan antara penawaran konsultan-konsultan atau pemasok-pemasok dengan biaya standarnya. Apabila selisih antara biaya standar dengan biaya penawaran dari konsultan atau pemasok terlalu besar, maka penawaran konsultan atau pemasok tersebut harus ditolak. Pemerintah akan menerima penawaran dari konsultan atau pemasok yang sesuai dengan biaya standarnya. Dengan penggunaan biaya standar, evaluasi anggaran pun menjadi lebih dapat diandalkan. Namun, penerapan biaya standar ini tidak cocok untuk pelaksanaan program kerja yang sangat bervariasi, karena biaya pengeluarannya akan sangat mahal untuk menentukan biaya standar tersebut. Manfaat penggunaan biaya standar tersebut menjadi tidak lebih besar daripada pengeluarannya. Tetapi, penentuan biaya standar ini akan dapat membantu apabila diterapkan pada program kerja pemerintahan yang tidak terlalu bervariasi. Program-program kerja tersebut menjadi lebih mudah dalam menyeleksi penawaran dari berbagai sumber.

Hal yang penting untuk terwujudnya pelaksanaan biaya standar ini adalah sistem kompensasi yang menjadi bagian dari mekanisme pelaksanaan biaya standar tersebut. Ketika suatu proyek atau program kerja dapat mencapai biaya standarnya, maka pelaksana proyek tersebut harus mendapatkan kompensasi berupa bonus. Jadi pelaksanaan anggaran akan selalu mengarah kepada pencapaian biaya standar. Bila perlu penggunaan biaya standar tersebut menjadi indikator kinerja kunci pada setiap pejabat pemerintah yang bertugas melaksanakan proyek atau program kerja. Jadi, pemerintah, terutama presiden sebagai kepala negara dapat mengarahkan perilaku dari para pejabat negara untuk selalu bekerja sesuai dengan arahan indikator kinerja kunci yang mengukurnya. Semua pejabat pemerintah akan berlomba-lomba untuk mencapainya, karena mereka diukur dan dinilai berdasarkan kriteria tersebut. Apabila mereka berhasil memenuhi kriteria-kriteria tersebut, maka mereka akan mendapatkan bonus dari pencapaiannya. Bonus yang diberikan harus dirancang untuk memicu kinerja semua lapisan pejabat pemerintah. Jadi, bonus yang diberikan harus disusun secara bertingkat sesuai dengan besar pencapaiannya dari setiap pejabat negara. Semoga usulan biaya standar dapat memberikan solusi bagi terwujudnya pelaksanaan program kerja negeri ini. Negara Indonesia selalu menjadi negara yang terus siap berkarya dan berkembang. □

Panjang naskah "Opini" 1.000 hingga 1.500 kata disertai foto.